

## PEMBANGUNAN DGN PENDEKATAN BUDAYA

- Nenek moyang Bangsa Indonesia pernah mencapai puncak kejayaan pada jaman Sriwijaya dan Majapahit sebagai bangsa bahari yang pengaruhnya mencapai Asia Tenggara bahkan Champa (Vietnam + Kamboja) dan Madagaskar, sedang ke timur mencapai Lautan Teduh. Kejayaan Majapahit tersebut memudar sejalan dengan terjadinya konflik keluarga (perebutan tahta) dan mulai berjayanya Selat Malaka sebagai pusat perdagangan baru di Kawasan Asia Tenggara.
- Interaksi dengan bangsa Eropa dimulai semenjak tahun 1596 (Alfonso d'Albuquerque). Interaksi ini berakhir dalam bentuk penjajahan oleh bangsa Belanda yang mencoba mencengkeramkan kekuasaan dengan cara membatasi kegiatan Kerajaan Mataram di daerah pedalaman sehingga secara bertahap Indonesia tidak lagi menjadi negara bahari. Bangsa Indonesia kemudian terpecah-pecah, atau sengaja dipecah-belah oleh Belanda, sehingga mengalami kesulitan untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda.
- Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah "Boedi Oetomo" yang merupakan organisasi modern yang pertama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini kelak ditetapkan sebagai awal kebangkitan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 1918, diselenggarakan Kongres Kebudayaan yang pertama di Solo. Walaupun cakupan masih sebatas pada budaya Jawa, namun kemudian berkembang menjadi budaya nusantara dan berujung pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
- Pergerakan Kemerdekaan tersebut akhirnya berujung kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang merupakan "jembatan emas" menuju kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Periode 1945 – 1950, Indonesia diwarnai dengan pergolakan perang kemerdekaan. Setelah pengambilalihan kedaulatan pada tahun 1949, negara Indonesia berubah-ubah bentuk kesatuan politiknya. Dan kemudian kembali kepada UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Setelah ini, Pemerintah lebih mengedepankan pengembangan politik, sehingga muncul istilah "**Politik sebagai Panglima**".

- Periode 1968-1998, kita lebih mengedepankan pembangunan ekonomi (*“Ekonomi sebagai Panglima”*), sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih materialistis yang cenderung merusak karakter bangsa.
- Reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 menghasilkan era demokratisasi dan timbulnya fanatisme kedaerahan sehingga belum sempat mengembangkan nilai-nilai “budaya bangsa”. Di samping itu, demokratisasi ditumpangi “anasir asing” lewat nilai-nilai dan budaya *neo-liberalisme, permisifisme* dan *neo-atheisme*. Penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain, yang di masa lalu di dasarkan pada penguasaan wilayah (kolonialisme), kemudian berkembang menjadi penguasaan perdagangan/ekonomi tanpa penguasaan wilayah, akan beralih ke penguasaan pola pikir (*‘mindset’*)
- Budaya diorientasikan pada politik pencitraan dan dunia industri (terjadi komodifikasi dan obyektifikasi budaya), sehingga kebudayaan diceraikan dari ranah pendidikan dan kehidupan dalam pengertian luas, khususnya dalam pembentukan karakter bangsa.
- Didasari oleh adanya keprihatinan tentang kondisi budaya bangsa saat ini, telah dideklarasikan pembentukan “Forum Kebudayaan Indonesia” pada tanggal 5 Juli 2008, yang merupakan langkah awal sebagai forum komunikasi untuk menggalang semua potensi budaya bangsa.
- Nenek moyang kita pernah menjadi bangsa yang besar, berdaulat dan disegani bangsa lain sehingga secara genetika tidak ada masalah untuk meraih kembali kebesaran tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki Sumber Daya Nasional berupa Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Buatan (SDB)/Teknologi yang dapat dipakai sebagai modal pembangunan bangsa.
- Untuk itu, perlu disusun suatu Agenda Pembangunan Bangsa dengan mengedepankan **nilai-nilai budaya** (*“Nilai-nilai Budaya sebagai Panglima”*) untuk mencapai Tujuan Nasional. Nilai-nilai budaya ini harus menjadi Pedoman bagi manusia Indonesia, baik yang di Birokrasi, Edukasi, Industri maupun yang di Masyarakat, utamanya pada jajaran Birokrasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat Kebijakan dan meng-enforced suatu peraturan (Regulasi), dengan menerapkan *Good Public Governance*.